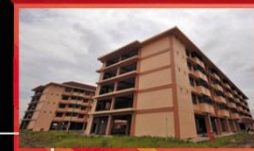


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Arahan Keterpaduan Program Pengembangan Kawasan Dan Infrastruktur PUPR di Provinsi Bangka Belitung

Bangka Tengah, 5 April 2018

BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT, BERTINDAK TEPAT




OUTLINE



TANTANGAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR NASIONAL



PENDEKATAN KEBIJAKAN KETERPADUAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR BERBASIS
PENGEMBANGAN WILAYAH



KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN
2019



KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR
DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI BANGKA
BELITUNG



PROGRAM 2019 HASIL PRA KONREG
PROVINSI BANGKA BELITUNG



NAWACITA & VISI MISI PRESIDEN



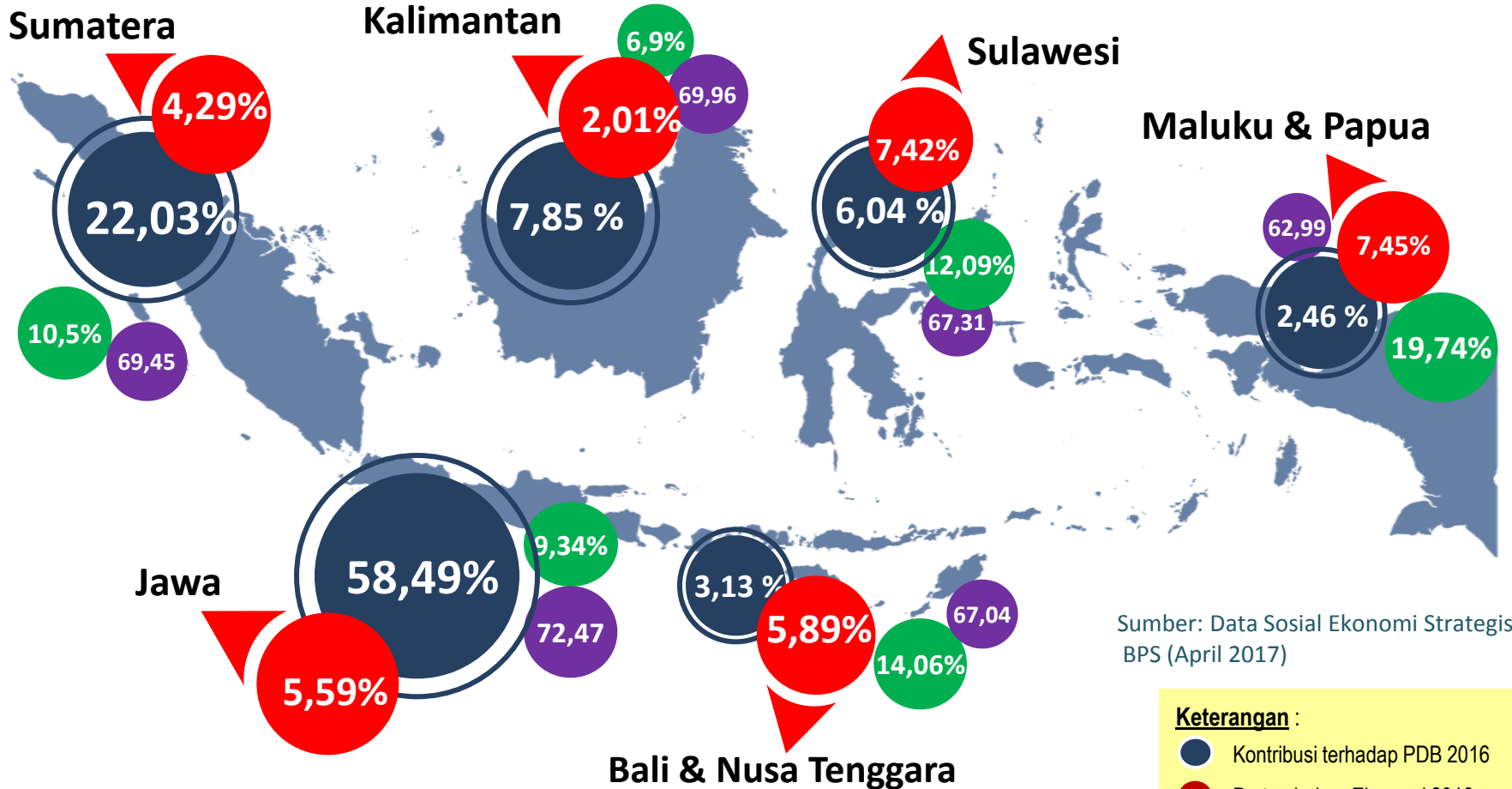
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.



TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019

TINGGINYA DISPARITAS EKONOMI & SOSIAL ANTAR DAERAH

"Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,49%"



Sumber: Data Sosial Ekonomi Strategis BPS (April 2017)

Keterangan :

- Kontribusi terhadap PDB 2016
- Pertumbuhan Ekonomi 2016
- Persentase Penduduk Miskin 2016
- Indeks Pembangunan Manusia 2015

Pertumbuhan Ekonomi Nasional (2016) **5,02%**
 Tingkat Kemiskinan (2016) **10,70%**
 IPM (2016) **70,18**

INDEKS DAYA SAING GLOBAL & INFRASTRUKTUR INDONESIA TAHUN 2017 - 2018

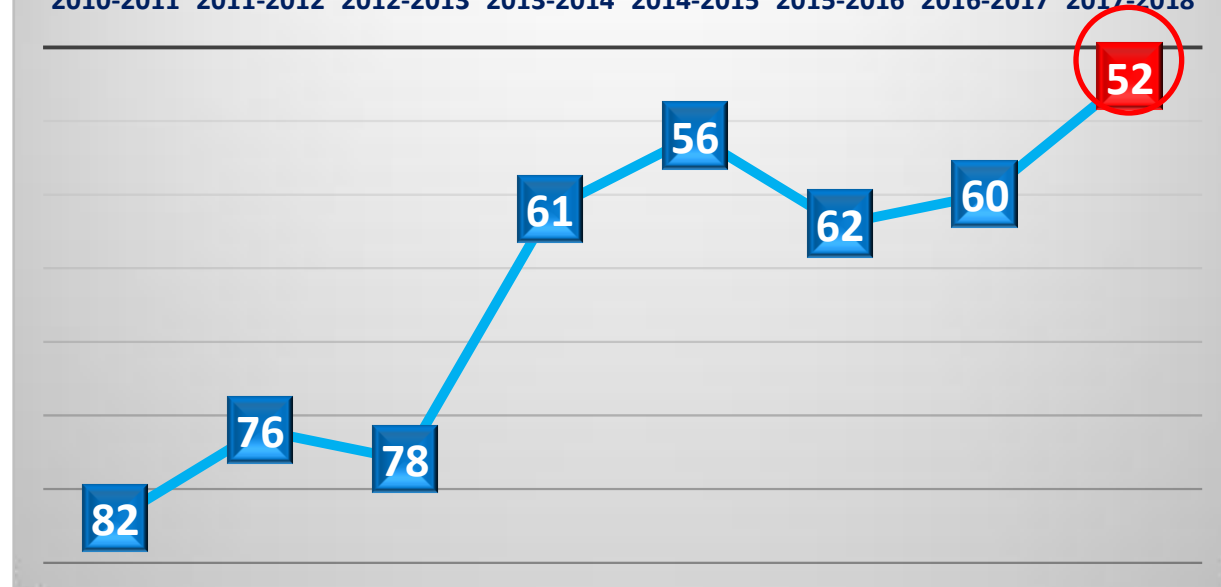
"...pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama merupakan pilihan yang logis dan strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mengejar ketertinggalan..."

Indeks Daya Saing Global Indonesia (GCI)

YEAR	RANK
2010 – 2011	44
2011 – 2012	46
2012 – 2013	50
2013 – 2014	38
2014 – 2015	34
2015 – 2016	37
2016 – 2017	41
2017 – 2018	36

INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

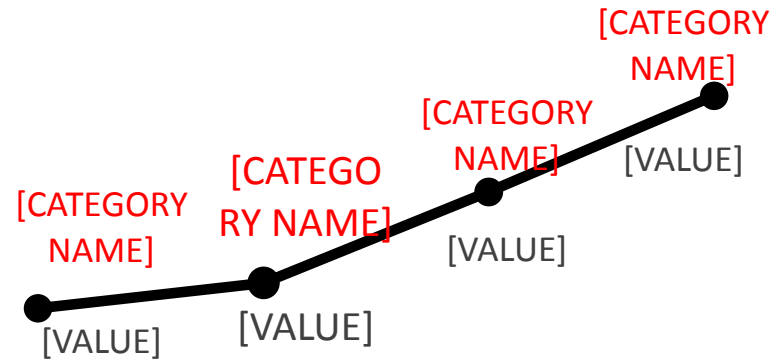


INDONESIA DI MATA INTERNASIONAL



Peningkatan peringkat *investment grade* atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional yang kredibel, yaitu Standard and Poor's, Fitch Ratings, dan Moody's.

Survei EoDB tahun 2017, **Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer** bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi **7 indikator** (dari 10 indikator EoDB).



Survei *Gallup World Poll* menempatkan **Indonesia pada peringkat pertama** sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat, yakni sebesar 80%.



TARGET RENSTRA KEMENTERIAN PUPR

- **46** Bendungan (8 baru & 36 on-going)
- **200 km** Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir
- **54** Pembangunan Embung
- **4,3 m³/detik** Pembangunan/peningkatan sarana & prasarana pengelolaan air baku
- **40.000 ha** Pembangunan jaringan irigasi baru
- **31** Pembangunan Pengendali Lahar/Sedimen

- **5.700 liter/detik** Pembangunan SPAM
- **2.564 ha** Penanganan Inf. Kawasan Pemukiman Kumuh
- **603.863 KK** Pengolahan Air Limbah
- **1.960.686 KK** Pelayanan Sistem Persampahan

TARGET PRIORITAS TAHUN 2019



- **1.120 km** Pembangunan Jalan
- **670 km** Pembangunan Jalan Tol (Pemerintah & Swasta)
- **10.029 m** Pembangunan Jembatan (tidak termasuk jembatan gantung)
- **1.467 m** Pembangunan Flyover/Underpass/Terowongan

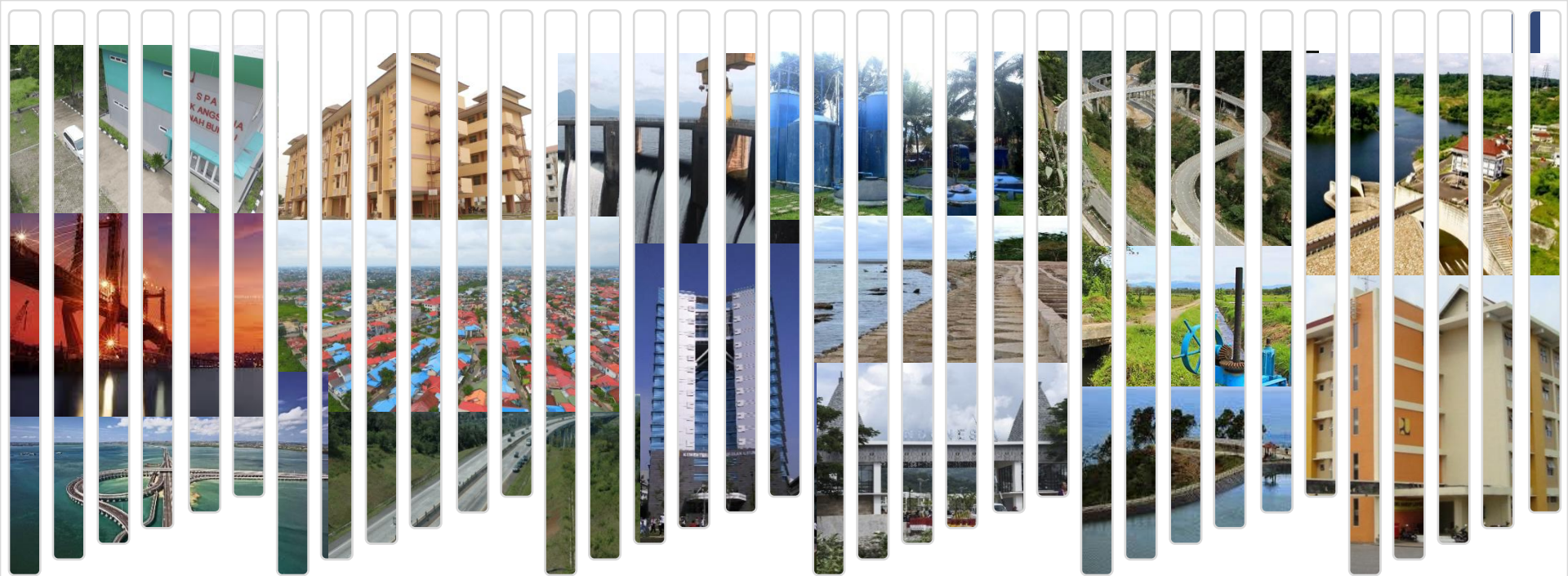


- **13.500** unit Rumah Susun
- **250.000 unit** Rumah Swadaya
- **5.000 unit** Rumah Khusus
- **30.000 unit** PSU Perumahan



- **22 km** Pembangunan dan peningkatan Prasarana pengaman pantai





PENDEKATAN KEBIJAKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR BERBASIS PENGEMBANGAN WILAYAH



PENDEKATAN PEMBANGUNAN HOLISTIK, INTEGRATIF, TEMATIK DAN SPASIAL



Setiap kawasan pertumbuhan untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan agar berfungsi secara optimal perlu koordinasi multi K/L terkait, antar tingkat pemerintahan, antar daerah, dan didukung secara penuh (komprehensif) sampai tuntas.

Kawasan pertumbuhan memiliki tema tertentu, misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan lumbung pangan, daerah tertinggal, dst.

HOLISTIK

INTEGRATIF

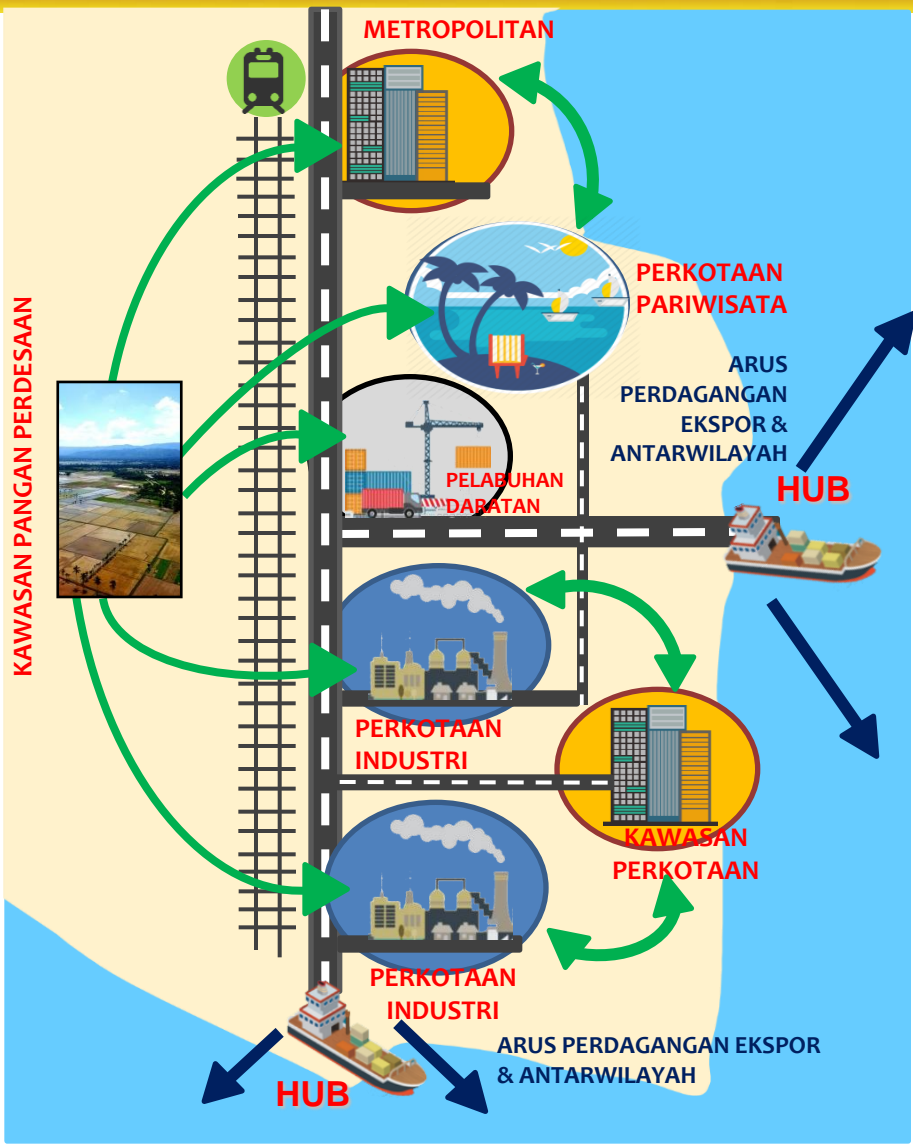
TEMATIK

SPASIAL

Pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai program dan kegiatan yang saling mendukung. Baik di internal K/L maupun antar K/L, antar tingkat pemerintahan, dan antar daerah.

Pembangunan kawasan strategis nasional, misalnya pembangunan sawah baru, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019 DENGAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH



Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada **35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)** untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Esensi:

1. Pengembangan wilayah terpadu dengan "market driven";
2. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis;
4. Mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS;
5. Mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.

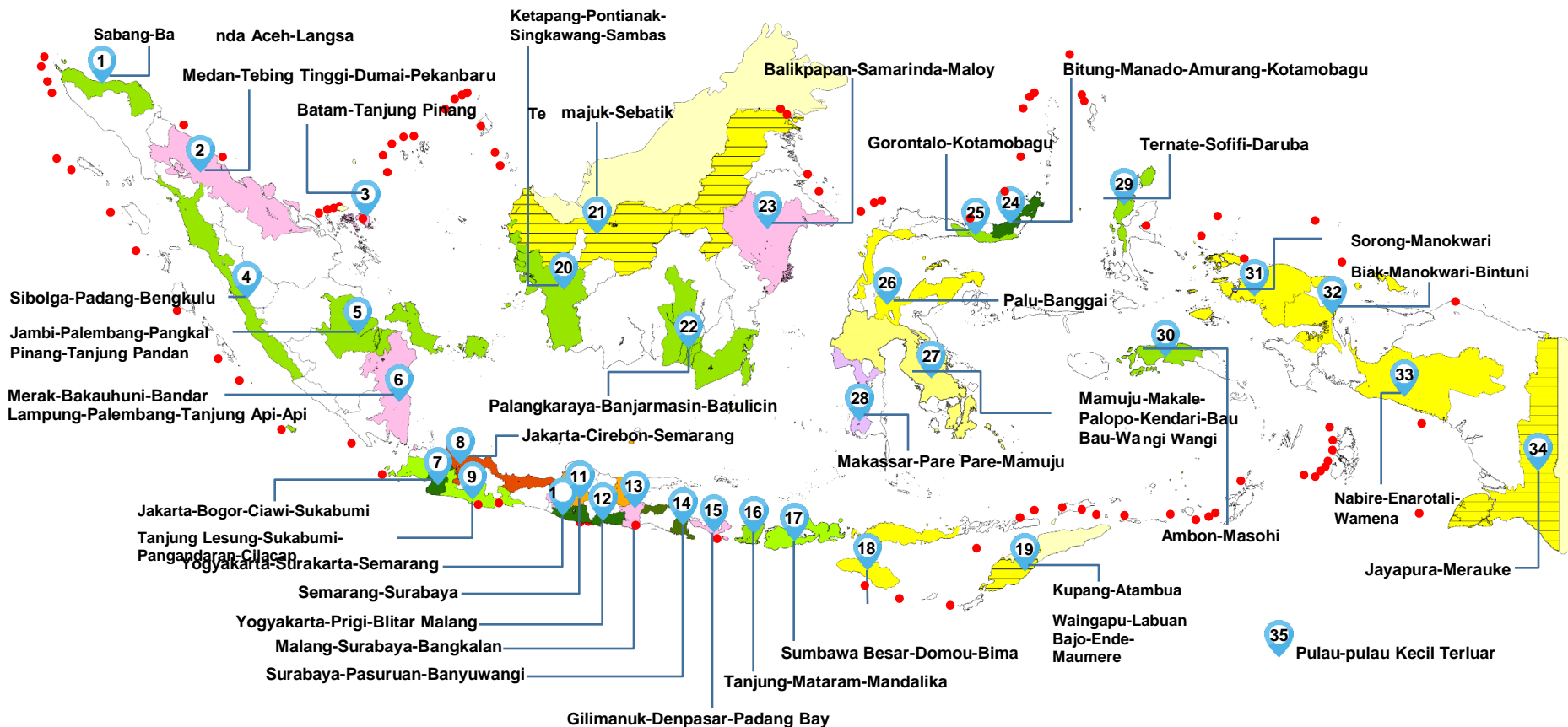
Untuk itu diperlukan:

- **Keterpaduan Perencanaan** antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS;
- **Sinkronisasi Program** antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana)
- **Koordinasi – Sinkronisasi** dalam pelaksanaan program

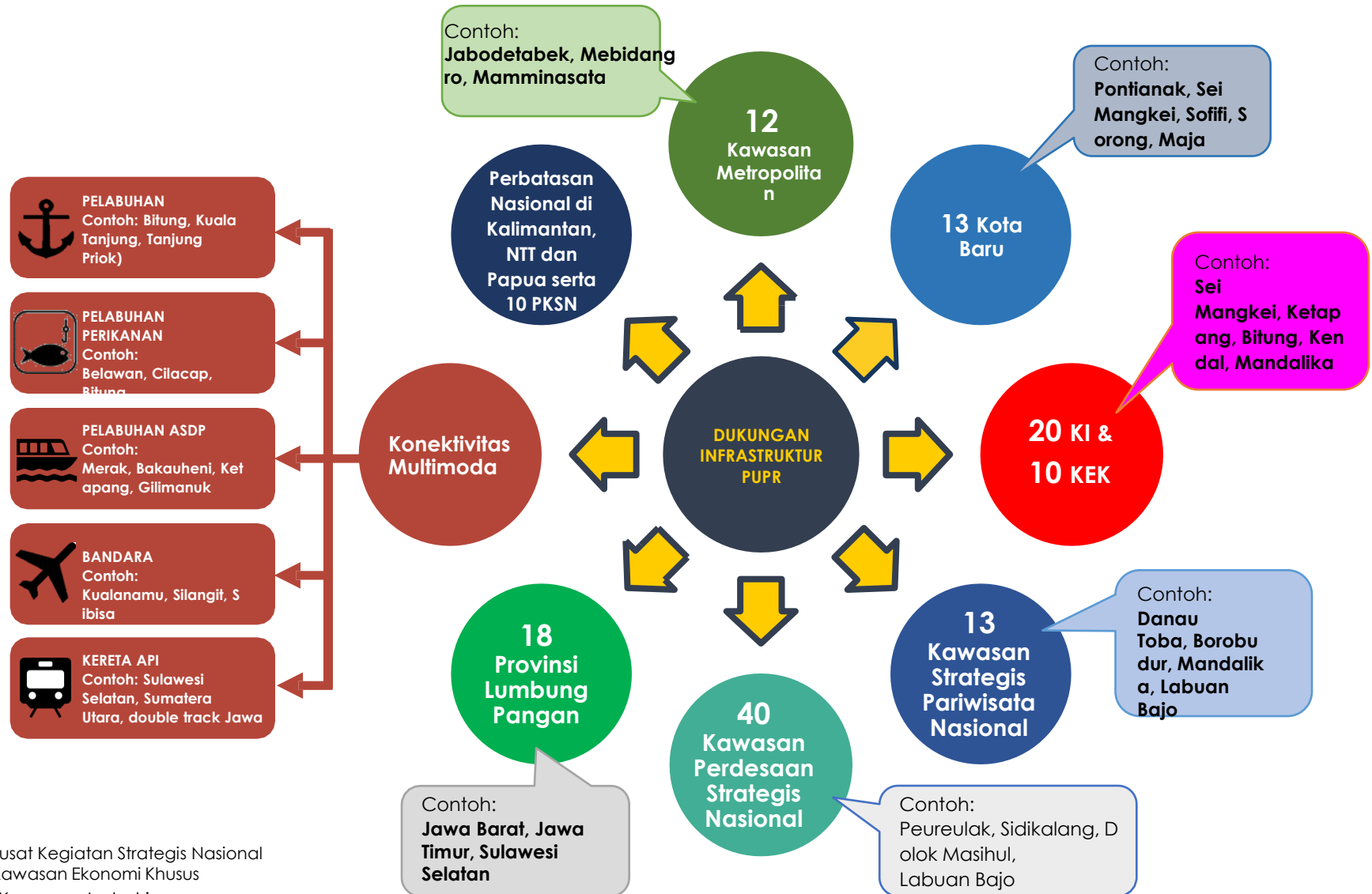
PETA SEBARAN 35 WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)



- Pulau-Pulau Kecil Terluar
- WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
- WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
- WPS Pusat Pertumbuhan Baru
- WPS Perbatasan Darat Negara



KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015-2019



PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional
KEK : Kawasan Ekonomi Khusus
KI : Kawasan Industri



KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2019



PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2019

TEMA: PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

1

Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Arah kebijakan: meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak

2

Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan konektivitas
- Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan desa
- Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi

3

Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif.

Arah kebijakan:

- Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri
- Peningkatan nilai tambah jasa produktif
- Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja

4

Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.

Arah kebijakan:

- Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SDA
- Peningkatan Produksi , Akses, dan Kualitas Pangan
- Peningkatan daya dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
- Pemantapan regulasi dan penguatan regulasi

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Catatan: *Mainstreaming: Revolusi Mental, Kesetaraan gender, lingkungan, governance.*

Sumber: Bappenas 2018

ARAHAN MENTERI TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN 2019 [1-2]

TIDAK ADA MYC BARU

Kecuali bendungan dan irigasi/air baku mendukung fungsi bendungan



**SELESAIKAN PEKERJAAN TEPAT
WAKTU
(JANGAN ADA YANG MANGKRAK)**

ARAHAN MENTERI TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN 2019 [2-2]

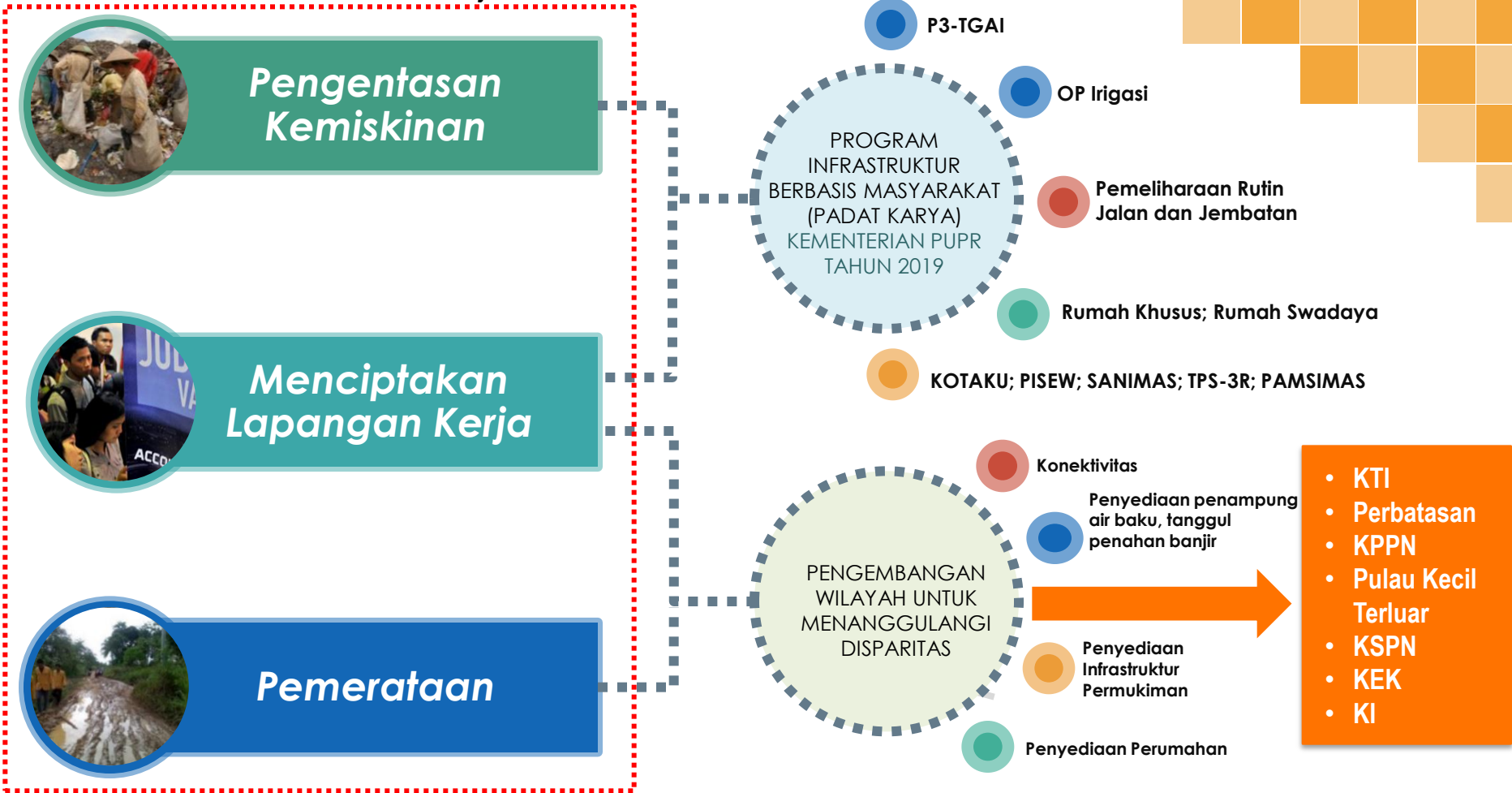
**PRIORITASKAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (ALOKASI 15%)
dari Total Pagu Kementerian**



**MANFAATKAN HASIL-HASIL
BALITBANG UNTUK SOLUSI
TEKNOLOGI**

KEBIJAKAN PROGRAM TA. 2019

Kebijakan Khusus



Catatan:

P3-TGAI : Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi
 KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh
 PISEW : Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
 PAMSIMAS : Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

SANIMAS : Sanitasi Berbasis Masyarakat
 TPS 3R : Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse & Recycle*
 KTI : Kawasan Timur Indonesia
 KPPN : Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN PUPR PENURUNAN PENGANGGURAN & KEMISKINAN, PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA

P3-TGAI

OP SDA



PISEW

SANIMAS

PAMSIMAS

KOTAKU

TPS 3R



PROGRAM KERAKYATAN (PADAT KARYA)

PRESERVASI
JALAN



RUMAH
KHUSUS

RUMAH
SWADAYA



ULTIMATE KONSEP WPS 5

JAMBI – PALEMBANG – PANGKAL PINANG – TANJUNG PANDAN TAHUN 2019

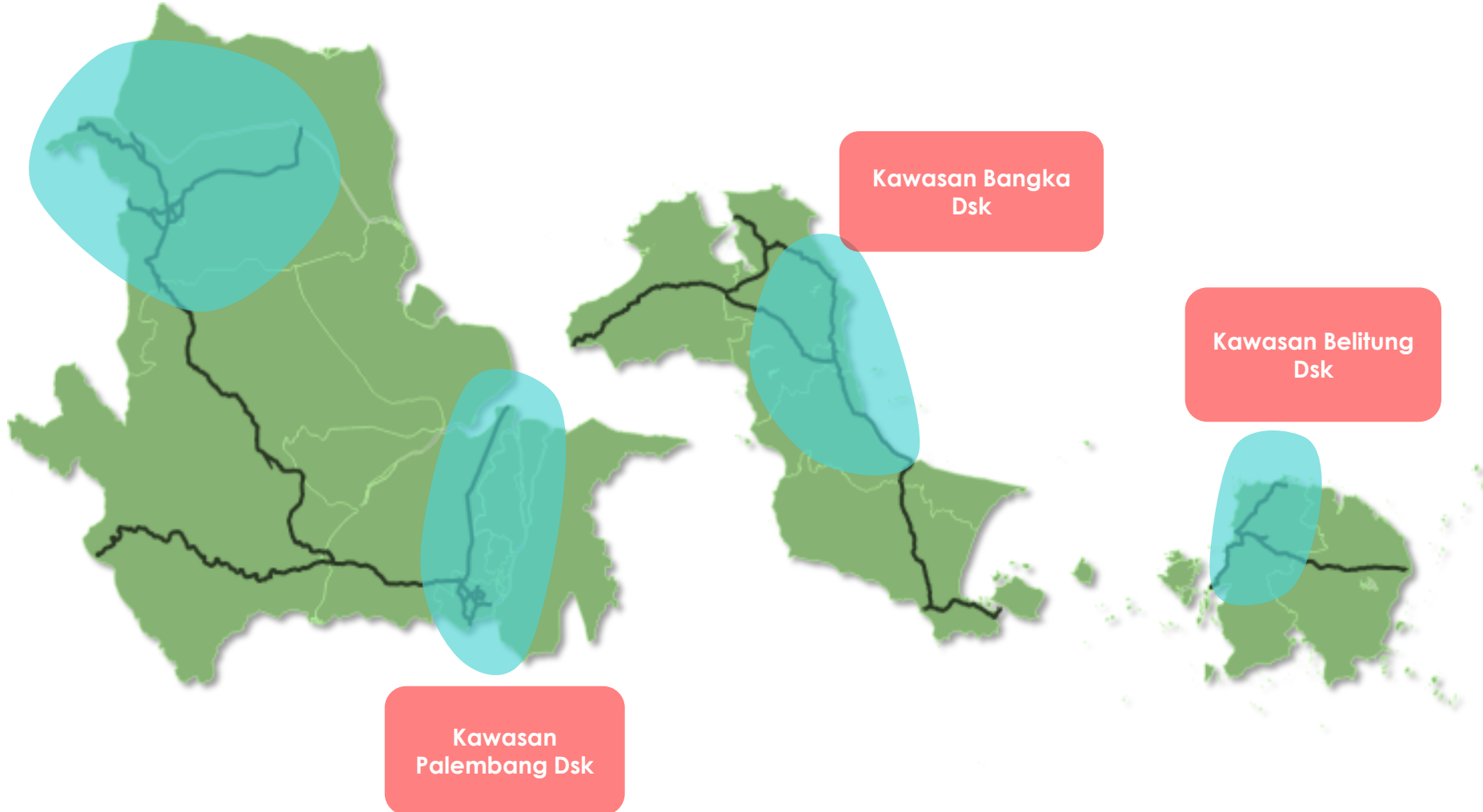
Kawasan Jambi
Dsk

TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA DAN ALAM YANG BERSINERGI
DENGAN PENGEMBANGAN AGRO-BAHARI SERTA OPTIMALISASI PENGOLAHAN
PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN.

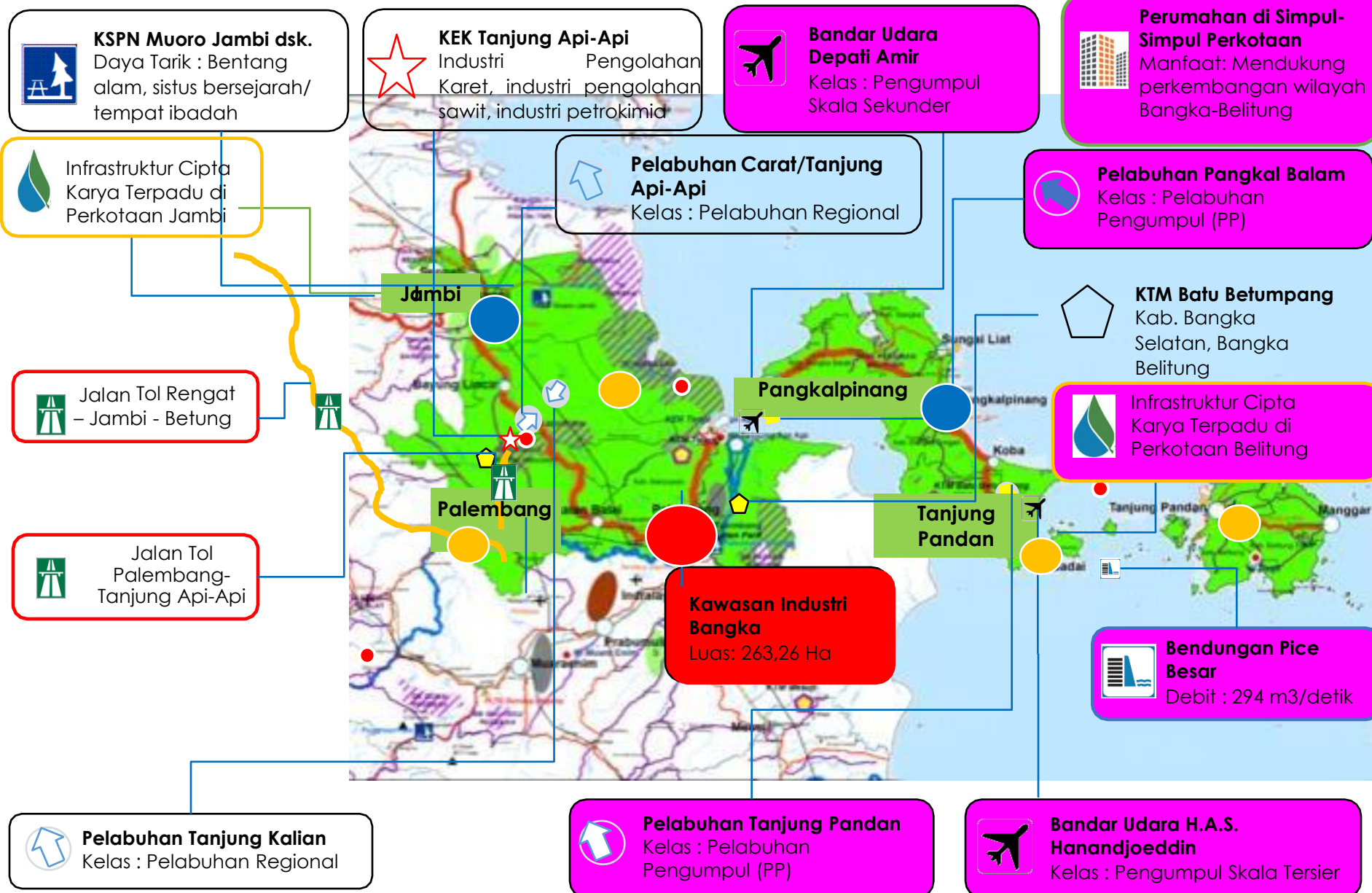
Kawasan Bangka
Dsk

Kawasan Belitung
Dsk

Kawasan
Palembang Dsk

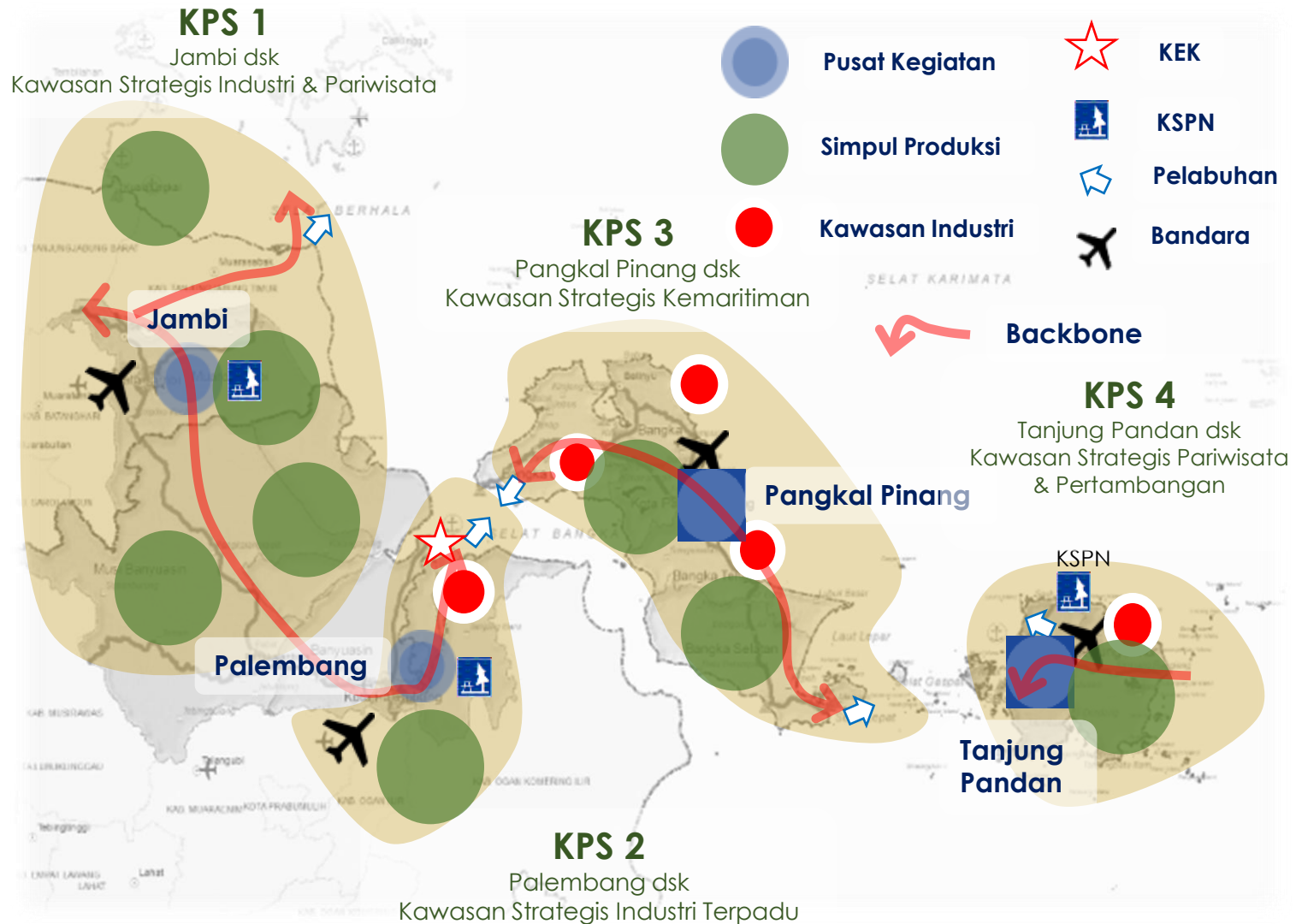


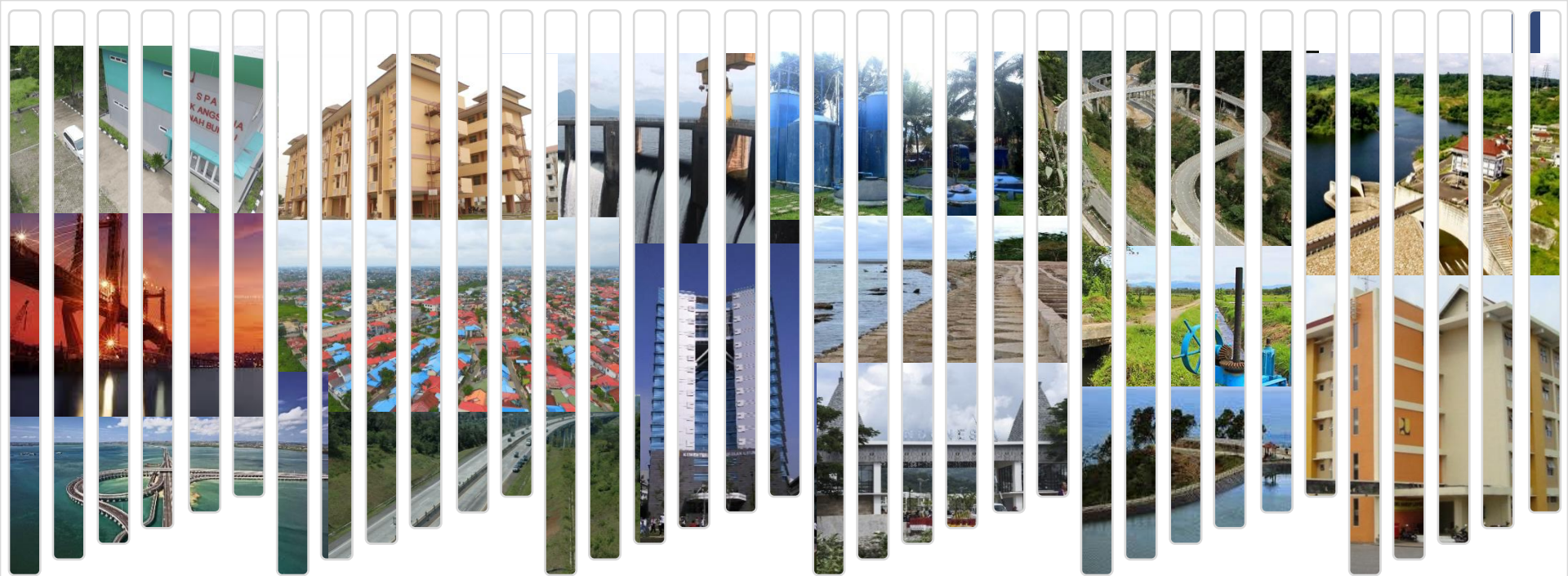
ULTIMATE INFRASTRUKTUR WPS 5 JAMBI – PALEMBANG – PANGKAL PINANG – TANJUNG PANDAN TAHUN 2019



STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH WPS 5 JAMBI – PALEMBANG – PANGKAL PINANG – TANJUNG PANDAN TAHUN 2019

SKENARIO PENGEMBANGAN KAWASAN








PROGRAM 2019 HASIL PRA KONREG PROVINSI BANGKA BELITUNG





PROGRAM HASIL PRAKONREG WPS 5 JAMBI – PALEMBANG – PANGKAL PINANG– TANJUNG PANDAN 2019


 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Sei Liat - Bts. Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka (3 km)


 Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Lumut - Puding Gebak Kab. Bangka (5 km)


 Pembangunan Rumah Khusus untuk ASN Desa Penyamun, Kab. Bangka (50 unit)


 Pembangunan IPA (100 Lps) untuk Intake Batu Mentas Kab. Belitung (100 Lt/dtk)


 Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kawasan Kota Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang (50.8 Ha)


 Peningkatan Pembangunan TPA Junjung Besaoh Desa Kepoh Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan (20.000 KK)


 Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Bukit Pading di Kab. Bangka Selatan (3 km)

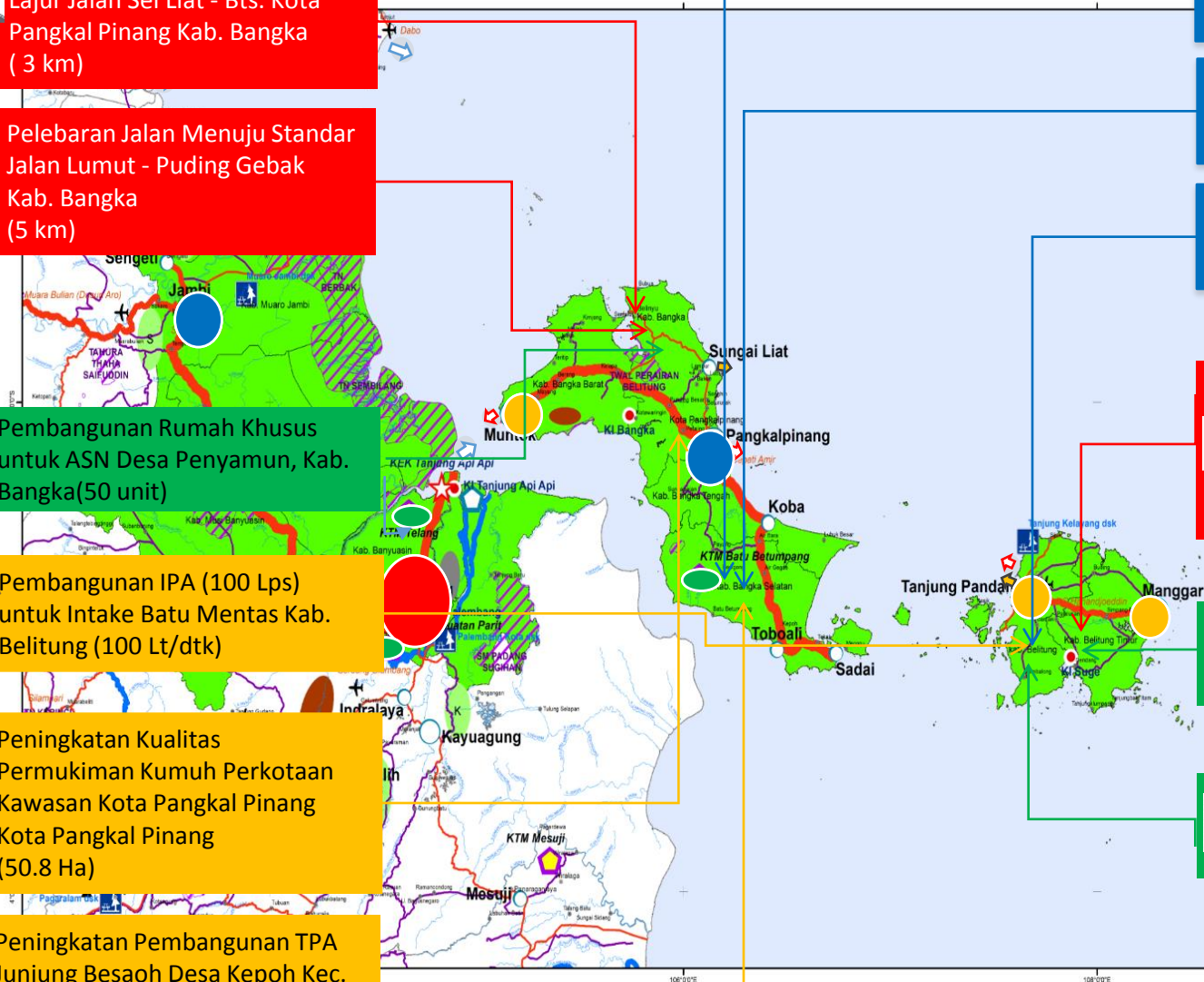
 Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Baku Bukit Permis di Kab. Bangka Selatan (3 km)

 Pembangunan Talud Pengaman Pantai Samak-Pegantungan (lanjutan) Kab. Belitung (1.2 km)

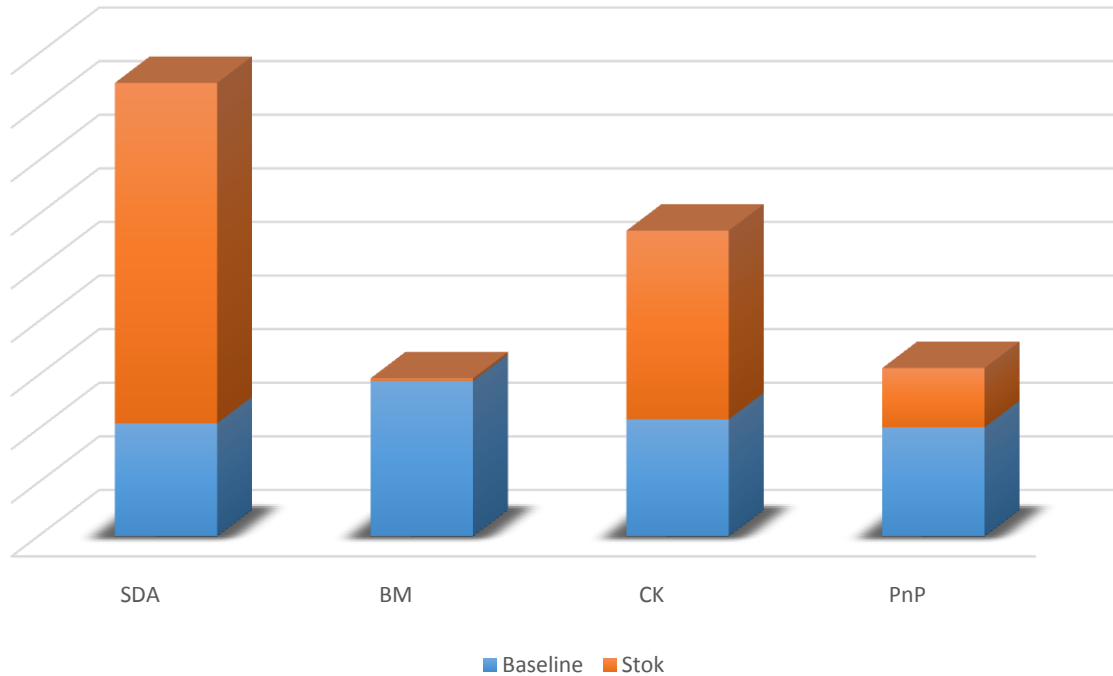
 Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Bts. Kab. Belitung/Belitung Timur - Sp. Ranggiang Kab. Belitung Timur (3.39 km)

 Pembangunan Rusus untuk Relokasi Suku Sawang Kab. Belitung Timur (100 unit)

 Pembangunan Rumah Susun Pekerja di KSPN Tanjung Kelayang Kab. Belitung (84 unit)



Rekap Hasil Kesepakatan Desk- Program 2019



	Baseline	Stok
SDA	210.842	634.988
BM	290.039	4.750
CK	218.163	352.053
PnP	203.474	110.429
Total	922.518	1.102.220



Program-Program Utama Hasil Kesepakatan (1)

SDA - Program TA 2019

1. Peningkatan Jaringan D.R. Dungun Raya di Kab. Bangka Selatan
2. Prasarana Penyediaan Air Baku Bukit Pading di Kab. Bangka Selatan
3. Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Kace
4. Pembangunan Penangkap Sedimen dan Normalisasi Alur Sungai Kace
5. Pembangunan Embung Konservasi Kolong Jernang
6. Pembangunan Kolam Retensi Hulu Linggarjati
7. Pembangunan Pemecah Gelombang Pantai Pasir Padi Tahap II



Program-Program Utama Hasil Kesepakatan (2)

BM – Program TA 2019

1. Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Bts. Kab. Belitung/Belitung Timur - Sp. Ranggiang
2. Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Sei Liat - Bts. Kota Pangkal Pinang
3. Pelebaran Jembatan 16.016.005.000 Ilir II



Program-Program Utama Hasil Kesepakatan (3)

Pengembangan Permukiman – Program TA 2019

- Pembangunan TPS3R Kabupaten Bangka
- Pembangunan Sanimas Kota Pangkal Pinang
- Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan Kws. Rias Kab. Bangka Selatan
- Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kelurahan Sungai Selan
- Pembangunan Sarana Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Selat Nasik



Program-Program Utama Hasil Kesepakatan (4)

Perumahan - Program T.A 2019

- Pembangunan PSU Rumah Umum
- Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Desa Baru, Kab. Belitung Timur
- Pembangunan Rusus untuk Relokasi Suku Sawang
- Pembangunan Rumah Khusus Tinggal Trans Meranteh
- Pembangunan Rumah Susun Pekerja di KSPN Tanjung Kelayang Kab. Belitung
- Pembangunan Asrama Mahasiswa Akademi Keperawatan
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Desa Betumpang dan Desa Rias Kab. Bangka Selatan



Keterpaduan Antarsektor

NO.	PERMASALAHAN	LOKASI	DJCK	DJSDA	SOLUSI
1.	Bappeda mengusulkan untuk segera melakukan pembangunan fisik untuk penanggulangan banjir di Kota Pangkalpinang.	Kota Pangkalpinang	Penanggulangan banjir di Kota Pangkalpinang. DJCK sudah membangun drainase di permukiman, namun penanganan perlu dilakukan juga di hulu.	DJSDA belum dapat melaksanakan karena belum ada studinya. Diusulkan agar program diusulkan ke Badan	Perlu dilaksanakan studi terkait penanganan banjir.
2.	“Pembangunan IPA untuk Intake Gunung Mentas 30 M” Air baku dari DJSDA selesai pada tahun 2018, untuk itu perlu segera disambung dengan perpipaan (IPA).	Gunung Mentas, Kab. Belitung	IPA dapat dibangun pada 2019 apabila review DED melalui APBD Kabupaten siap dilaksanakan.	DJSDA mengharapkan air baku dapat segera disambungkan ke IPA permukiman	Kegiatan masuk baseline dengan catatan review DED dan pembebasan lahan selesai pada tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Belitung berkomitmen untuk menyelesaikan review DED berdasarkan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Kep. Bangka Belitung.



TERIMA KASIH